



PAPER – OPEN ACCESS

Merekonstruksi Peran Agama Dalam Proses Mitigasi Bencana

Author : Achmad Zainal Arifin
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.580
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Merekonstruksi Peran Agama Dalam Proses Mitigasi Bencana

Reconstructing the Role of Religion in the Process of Disaster Mitigation

Achmad Zainal Arifin

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email : achmad.arifin@uin-suka.ac.id

Abstract

Almost every time a disaster occurs in this country, religious discourses always appear or intentionally are appeared for the interests of certain elite or religious groups. Discourses that links disasters with God's doom or the reluctance of citizens to evacuate, before, during, and even those who refuse relocation after the disaster event by utilizing religious beliefs or doctrines as their basis, to some extent, requires a wiser solution. The approach that tends to be in the same direction and only considers the "scientific" aspect, sometimes it actually triggers the increasing resistance of citizens who have the potential to be affected by disasters. The case of the death of Mbah Maridjan and several of his followers in the Merapi Eruption disaster in 2010, for example, could be a valuable lesson that the disaster mitigation process only relies on one aspect, in this case an explanation from BMKG, which is then rigidly socialized without touching aspects of trust deeply rooted in the community around the slopes of Merapi, it did not work well. Simply put, by following Auguste Comte's three-stage theory of society, namely: religion, metaphysics, and positivity, we should be able to learn that a positive (scientific) approach will only work well in a positive society. If we impose a positive approach to the community at the level of religion and metaphysics, of course it will cause problems, especially related to the effectiveness of the approach in solving disaster mitigation problems in the community because indeed each of these levels has a different foundation of belief in truth with another. Through Comte's understanding of the three-stage theory of society, this paper invites readers to be able to reconstruct the role of religion in the disaster mitigation process, especially related to bencana management issues that come in contact with issues of public confidence and trust. Of course, this paper is made in the hope that it can present a more comprehensive approach and be able to minimize the impact of natural disasters in the community

Keywords: Mitigation; Education; Religion; dan Disaster

Abstrak

Hampir setiap kali terjadi bencana di negeri ini, wacana keagamaan selalu muncul atau sengaja dimunculkan untuk kepentingan elit ataupun kelompok agama tertentu. Wacana yang mengkaitkan bencana dengan azab Tuhan ataupun keengganan warga untuk mengungsi, baik sebelum, selama, dan bahkan yang menolak relokasi setelah peristiwa bencana dengan menjadikan kepercayaan atau keyakinan agama sebagai dasarnya, tentu saja perlu adanya penanganan yang lebih bijak. Pendekatan yang cenderung searah dan hanya mempertimbangkan aspek "ilmiah" saja, terkadang justru memicu semakin besarnya penolakan dari warga yang berpotensi terdampak bencana. Kasus meninggalnya Mbah Maridjan dan beberapa pengikutnya pada bencana Erupsi Merapi tahun 2010, misalnya, bisa menjadi pelajaran yang berharga bahwa proses mitigasi bencana yang hanya bertumpu pada satu aspek, dalam hal ini penjelasan dari BMKG, yang kemudian disosialisasikan secara *rigid* tanpa menyentuh aspek-aspek kepercayaan yang mengakar cukup kuat di masyarakat sekitar lereng Merapi, ternyata tidak berhasil dengan baik. Secara sederhana, dengan mengikuti teori tiga tahap masyarakat dari Auguste Comte, yaitu: agama, metafisika, dan positif, seharusnya kita bisa belajar bahwa pendekatan positif (ilmiah) hanya akan bekerja dengan baik pada masyarakat positif. Apabila kita memaksakan pendekatan positif kepada masyarakat yang ada pada level agama dan metafisika, tentu saja akan menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan efektifitas pendekatan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan mitigasi bencana di masyarakat karena memang masing-masing level tersebut memiliki landasan keyakinan akan kebenaran yang berbeda satu dengan yang lain. Melalui pemahaman teori masyarakat tiga tahap yang dilontarkan oleh Comte, makalah ini mengajak para pembaca untuk bisa merekonstruksi kembali peran agama dalam proses mitigasi bencana, khususnya terkait dengan isu-isu manajemen bencana yang bersentuhan dengan masalah keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Tentu saja, makalah ini dibuat dengan harapan bisa menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan mampu meminimalisir dampak bencana alam di masyarakat.

Kata Kunci: Mitigasi, Pendidikan, Agama, dan Bencana.

1. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi alam bangsa Indonesia menuntut masyarakatnya untuk bisa “berdamai” dengan berbagai bentuk bencana alam, mulai dari erupsi gunung berapi, gempa bumi, angin puting beliung, hingga ancaman tsunami bagi masyarakat yang banyak tinggal di pesisir pantai [1]. Secara geografis, letak negara ini memang diapit dua samudera dan dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif, yang sering diistilahkan dengan cincin api (*ring of fire*). Berbagai bentuk bencana, sebagai konsekuensi logis dari letak geografis semacam ini, sudah sepatutnya pendidikan tentang kebencanaan, termasuk didalamnya proses mitigasi, mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak [2]. Wacana yang seringkali muncul tentang “bencana sebagai bentuk azab dari Tuhan” atas merebaknya berbagai tindak maksiat yang dilontarkan oleh sebagian kalangan agamawan [3], seharusnya juga bisa dilihat sebagai bagian dari kurang masifnya pendidikan kebencanaan yang sampai pada level akar rumput. Masyarakat, di sebagian tempat, khususnya di daerah-daerah pedesaan seringkali memang harus “mengamini” wacana-wacana yang dilontarkan tersebut karena hanya wacana-wacana itulah yang tersedia dan mendominasi alam pikiran mereka [4].

Sebenarnya, perhatian kalangan agamawan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan sudah mulai berkembang dengan baik, sebut saja misalnya berbagai kajian tentang Fikih Lingkungan [5] atau bahkan Fikih Kebencanaan [6]. Namun, kajian-kajian semacam ini memang masih perlu terus didorong agar bisa menjadi arus utama wacana keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia, karena saat ini wacana fikih yang ada masih didominasi aspek-aspek terkait peribadahan dan hubungan sesama manusia dalam konteks mu’amalah (interaksi sosial). Tentu saja pengarusutamaan wacana-wacana kebencanaan dan pelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan setidaknya untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan komunitas Muslim bahwa aspek ibadahdalam Islam tidak hanya terkait dengan urusan shalat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah semacamnya, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah yang terkait dengan kebaikan atau kemashlahatan bersama, termasuk kepedulian dan kesadaran untuk berperan aktif ketika terjadi bencana dan bisa membantu proses mitigasi bencana agar bisa berjalan dengan baik.

Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembelajaran terkait cara-cara merespon bencana ataupun mengikuti prosedur mitigasi bencana dari pihak yang berwenang, nampaknya masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dari berbagai bentuk penolakan (resistensi) masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan atau berpotensi terdampak bencana untuk mengikuti proses mitigasi bencana yang ditetapkan [7]. Mungkin kasus meninggalnya Mbah Maridjan dan beberapa warga yang memutuskan mengikuti langkah beliau untuk tidak turun mengungsi pada peristiwa erupsi Gunung Merapi 2010 mungkin bisa dijadikan sebagai cermin bersama bahwa terkadang satu model pendekatan yang selama ini dipandang sebagai representasi dari masyarakat yang berada dalam tahap positif, menurut teori tiga tahap Comte [8], belum tentu bisa diterima oleh masyarakat yang berada pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu agama dan metafisika. Seringkali, bentuk resistensi yang muncul di masyarakat terkait dengan upaya mitigasi bencana bisa jadi merupakan buah dari kealpaan kita dalam melihat dan memahami konteks masyarakat. Hasilnya adalah penyampaian pesan-pesan penting terkait proses mitigasi bencana seakan kurang mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

Dalam konteks inilah, makalah ini mencoba untuk menawarkan upaya untuk mengkaji kembali peran agama dalam proses mitigasi bencana, khususnya terkait dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan melaksanakan prosedur mitigasi bencana yang ada. Berbagai resistensi masyarakat yang muncul terkait dengan proses mitigasi bencana, semisal keengganan untuk mengungsi, baik karena kepercayaan-kepercayaan lokal maupun pemahaman yang kurang pas terkait dengan doktrin tawakkal/pasrah dengan situasi, sudah memang semestinya menjadi lahan garapan dari bidang agama, sesuai dengan alam pikiran mereka. Kegagalan memahami alam pikiran masyarakat, apalagi ditambah dengan pandangan negatif atau memandang rendah akan keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai wujud arogansi “keilmuan” Barat, tentu saja akan melahirkan resistensi atas informasi terkait dengan proses dan prosedur mitigasi bencana yang disampaikan.

2. Mitigasi dan Persoalan Peran Agama

Secara sederhana, mitigasi bisa diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian, baik berupa harta benda maupun korban jiwa, akibat dari terjadinya bencana dengan melakukan persiapan sebelum terjadinya bencana [9]. Pengertian semacam ini tentu saja mengandung makna yang sangat luas dan seyogyanya melibatkan semua pihak dan bersifat lintas bidang dan sektor. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, *mitigasi* didefinisikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Definisi ini setidaknya menyiratkan bahwa tujuan utama dilaksanakannya program mitigasi bencana adalah: (1) meminimalisir atau bahkan meniadakan dampak dan/atau resiko terjadinya

bencana, baik berupa harta-benda, lebih-lebih lagi korban jiwa; (2) adanya standard operation procedure (SOP) yang jelas dan bisa dijadikan pedoman pemerintah dalam penentuan kebijakan pembangunan pemukiman dan tata kota; dan (3) membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tiga hal ini tentu saja memerlukan sinergi dari berbagai bidang untuk bisa memunculkan model mitigasi yang komprehensif dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara.

Dalam kenyataannya, apa yang menjadi tujuan ideal bagi proses mitigasi ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan, mengingat tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan masih sangat beragam. Hal ini bisa kita lihat dari masih cukup dominannya wacana-wacana terkait dengan bencana yang dihubungkan dengan nilai-nilai agama atau kepercayaan yang ada di masyarakat. Setiap kali terjadi bencana di suatu daerah, selalu ada saja kelompok masyarakat yang menghubungkannya dengan azab Tuhan sebagai akibat dari semakin merajalelanya kemaksiatan di daerah tersebut [10]. Tentu saja, pandangan semacam ini, disadari atau tidak, akan memunculkan bentuk antisipasi terhadap bencana yang berbeda dan berpotensi untuk menjadi penghambat model mitigasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk wilayah-wilayah tertentu. Disinilah sebenarnya perlunya memperhatikan aspek agama atau keyakinan dari masyarakat terkait dengan pembentukan model mitigasi bencana yang lebih bersifat komprehensif. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kebencanaan, termasuk didalamnya proses mitigasi, sudah seharusnya dikolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk elit agama. Untuk konteks masyarakat tertentu, misalnya di wilayah perkotaan dimana tingkat literasi kebencanaan sudah cukup tinggi bisa jadi tidak akan memunculkan masalah yang berarti terkait upaya untuk sosialisasi standard operational procedures (SOP) bila terjadi bencana. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan bahwa masih cukup banyak masyarakat kita yang jauh lebih mematuhi elit agama dibandingkan dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang lain [11]. Kultur masyarakat yang masih cenderung bersifat paternalistik [12] tentu saja akan memunculkan hambatan tersendiri, terlebih ketika elit agama lokal tidak diajak ikut serta dalam peningkatan pemahaman masyarakat akan kebencanaan.

Kasus meninggalnya Mbah Maridjan dan beberapa pengikutnya pada peristiwa erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010 haruslah menjadi pembelajaran bersama bahwa aspek keberagaman atau keyakinan akan nilai-nilai lokal tertentu di masyarakat memang masih cukup dominan dan ditopang dengan praktek budaya paternalistik yang masih mengakar cukup dalam di masyarakat. Dalam konteks ini, mengandalkan pendekatan “ilmiah” *an sich*, sebagai satu-satunya cara untuk membuka pemahaman masyarakat akan dampak dan resiko bencana yang akan mereka hadapi tentulah sangat riskan. Alih-alih bisa membuka wawasan masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana, pendekatan yang salah justru malah berpotensi untuk semakin mengkrustalkan keyakinan-keyakinan lokal mereka yang bisa jadi bertentangan dengan tujuan dari upaya mitigasi bencana [13]. Dalam konteks bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, memang berbagai bentuk upaya sudah dilakukan untuk meminta Mbah Maridjan turun ke lokasi pengungsian yang telah disediakan. Bahkan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang notabene juga merupakan Sultan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, juga sudah berupaya untuk membujuk Mbah Maridjan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Jatuhnya korban terkait prosedur mitigasi yang tidak diikuti dengan baik oleh warga masyarakat, tentu saja perlu untuk disikapi secara lebih bijak. Apakah memang upaya sosialisasi, khususnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dan resiko bencana, selama ini sudah berjalan dengan maksimal, khususnya terkait dengan peran elit agama dan tokoh masyarakat?

Sebenarnya kajian-kajian yang sifatnya masih sporadis terkait dengan agama dan wacana-wacana pelestarian lingkungan sudah cukup banyak dilakukan oleh mereka yang selama ini dipandang memiliki otoritas di bidang keagamaan [14], atau setidaknya yang dilakukan oleh kalangan akademis, khususnya dari perguruan tinggi-perguruan tinggi Agama, khususnya Islam [5][15][16]. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut nampaknya kurang mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bagian yang terintegrasi dari proses dan prosedur kebencanaan di tanah air. Padahal, tidak sedikit buku-buku tersebut yang menawarkan kajian-kajian menarik terkait dengan upaya bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan memberikan landasan teologis atas perilaku-perilaku yang bisa memunculkan *ghirah* atau semangat yang baru dalam menjaga kelestarian alam. Pemberian label “halal” dan “haram” atau “berpahala” dan “berdosa”, misalnya, bisa jadi pada tataran praktis kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan, masih jauh lebih efektif dibandingkan dengan himbauan-himbauan aparat pemerintah atau aktivis-aktivis LSM, yang seringkali dipandang tidak memiliki keterkaitan atau tidak menimbulkan dampak secara langsung bagi kehidupan sehari-hari warga masyarakat [17].

Sayangnya, dengan meminjam teori tahapan masyarakat yang dicetuskan oleh Auguste Comte, faktor agama justru seringkali dilihat sebelah mata atau bahkan hanya dipandang sebagai faktor penghambat dalam proses sosialisasi mitigasi bencana karena dianggap kurang atau bahkan tidak mengandung unsur-unsur ilmiah sama sekali. Kita seakan-akan lupa bahwa kategorisasi masyarakat kedalam level agama, metafisika, dan positif, muncul dalam konteks masyarakat Barat yang memang saat itu sedang begitu semangatnya menjauhi doktrin gereja yang memang dalam beberapa hal bertentangan dengan temuan-temuan baru perkembangan ilmu pengetahuan [18][19]. Dalam hal ini, kasus penemuan Copernicus terkait konsep “heliosentrisme” yang memang bertentangan dengan doktrin gereja

terkait dengan “geosentrisme” seringkali dijadikan rujukan sekaligus sebagai bahan cemoohan atas kepongahan kaum agamawan atas para ilmuan [20][21]. Karena masyarakat kita tidak dalam situasi yang sama dengan kondisi pada saat Comte menginisiasikan teori tiga tahapnya tersebut, maka sudah seharusnya teori tersebut perlu dibaca dengan konteks yang berbeda. Setidaknya teori tiga tahap tersebut tidak harus dibaca sebagai suatu bentuk pergeseran masyarakat yang bersifat vertikal, yang pada akhirnya berimplikasi pada munculnya superioritas tahap positif atas dua tahapan masyarakat yang lainnya.

Perasaan superioritas, yang pada akhirnya memunculkan keengganan untuk mendengarkan pandangan yang dari mereka yang masih berada di tahapan yang berbeda tentu saja akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif warga masyarakat akan proses dan prosedur mitigasi bencana. Perbedaan mendasar terkait alam pikiran masyarakat pada masing-masing tahap menjadi terabaikan. Hal-hal yang dipandang sebagai “kebenaran” oleh warga masyarakat yang berada pada tahap positif, belum tentu bisa dipahami dan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh warga masyarakat pada tahapan yang berbeda. Bagi masyarakat pada tahap positif, ilmuanlah yang seringkali dipandang sebagai figur yang harus diikuti atau dijadikan role-model oleh masyarakat. Sementara pada tahapan agama, warga masyarakat tetapakan melihat sosok elit agamawan-lah yang diyakini sebagai pihak yang paling otoritatif dalam menjelaskan tentang “kebenaran” [22]. Kenyataan semacam ini seharusnya tidak diabaikan begitu saja, khususnya dalam proses sosialisasi mitigasi bencana. Sebenarnya tidak sedikit kajian-kajian fiqh pelestarian lingkungan yang bisa dimanfaatkan dalam membantu memberikan legitimasi atas penjelasan-penjelasan ilmiah agar tidak mudah memunculkan perasaan curiga yang pada akhirnya berbuntut pada pengabaian warga masyarakat akan hal-hal mendasar terkait pemahaman akan resiko dan dampak bencana.

3. Mendefinisikan Kembali Peran Agama Dalam Proses Mitigasi Bencana

Kurang optimalnya, atau bahkan pengabaian, atas peran agama dan agamawan dalam proses peningkatan kesadaran warga masyarakat atas proses dan prosedur mitigasi bencana, sebagaimana terlihat dari kurang dimanfaatkannya kajian-kajian keagamaan terkait pelestarian lingkungan dan pelibatan kaum agamawan, menjadi satu kendala tersendiri pada proses sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat atas resiko dan dampak bencana. Masih cukup banyaknya korban jiwa pada setiap kejadian bencana di tanah air mengisyaratkan perlunya dilakukan evaluasi atas model sosialisasi mitigasi bencana yang selama ini dijalankan. Memang, upaya pelibatan agama dalam meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan dampak dan resiko bencana bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat ada cukup banyak doktrin atau kepercayaan warga masyarakat yang bersumber pada ajaran agama, yang apabila disalahpahami justru akan memunculkan perilaku yang bisa kontra-produktif dengan tujuan dasar mitigasi bencana. Salah satu contoh sederhana misalnya terkait dengan konsep “tawakkal” yang seringkali diidentikkan dengan kepasrahan total kepada “takdir” atau ketetapan Tuhan. Konsep semacam ini seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi sebagian elit agama dan diikuti oleh para pengikut mereka untuk enggan terlibat dalam proses mitigasi bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh kasus yang sempat viral di berbagai media sosial terkait seorang imam yang memilih tetap melanjutkan sholatnya pada saat terjadi gempa di Lombok tahun 2018 yang lalu, misalnya, mendapatkan berbagai komentar yang beragam. Sebagian besar menunjukkan rasa bangga dan simpati atas keteguhan sang imam untuk melanjutkan shalatnya meskipun sedang diguncang gempa. Pandangan semacam ini tentu akan bertentangan dengan berbagai bentuk anjuran dan bahkan perintah yang dirumuskan dalam prosedur mitigasi ketika terjadi bencana gempa bumi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar umat Islam tentu akan merindukan untuk bisa meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah, dan meninggal dalam keadaan sedang menjalankan ibadah tentu menjadi bagian dari keinginan sebagian besar umat Islam tersebut. Kenyataan semacam ini tentu perlu mendapatkan respon dari para pemegang otoritas keagamaan agar pada akhirnya tidak bertabrakan dengan prosedur mitigasi bencana yang ada.

Sebenarnya, ada cukup banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan dalam perumusan model mitigasi bencana, khususnya terkait dengan antisipasi atas model pandangan keagamaan sebagaimana dicontohkan diatas. Sebenarnya, dalam Islam sendiri ada kaidah-kaidah *ushul fiqh* (prinsip dasar hukum) yang bisa digunakan untuk merespon pandangan sebagaimana diatas, misalnya: “نَزَاءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ” yang artinya “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat” [23][24] yang dalam konteks kasus diatas bisa dipahami bahwa seharusnya imam tersebut membatalkan shalatnya untuk menyelamatkan diri dan orang lain yang menjadi makmumnya, dibandingkan meneruskan shalat padahal jelas potensi membahayakan keselamatan diri secara nyata ada dihadapannya. Terlebih, pemahaman semacam ini merupakan ijma’ (kesepakatan) ulama dan tidak ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) terkait dengan penerapannya terkait kondisi-kondisi yang membahayakan jiwa seseorang [25][24]. Hanya saja, harus diakui bahwa kaidah-kaidah semacam ini bisa dikatakan hanya dipahami dan beredar dikalangan tertentu dan masih

jarang disosialisasikan secara massif kepada warga masyarakat. Disinilah, menurut hemat penulis, perlu adanya upaya untuk memaknai kembali peran agama dalam proses sosialisasi mitigasi bencana kepada warga masyarakat.

Selama ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat akan prosedur mitigasi bencana hanya sebatas pada pelibatan tokoh agama untuk membantu proses sosialisasi, dimana materi dan konten mitigasinya sendiri disusun tanpa melibatkan tokoh atau elit agama. Bahkan, tidak jarang para elit agama yang diminta bantuan untuk melakukan sosialisasi tersebut sebenarnya juga belum bisa dengan baik memahami materi dan konten yang harus disampaikan. Pelibatan elit agama, atau setidaknya kalangan akademisi yang dipandang juga memiliki otoritas di bidang agama, sudah seharusnya dilaksanakan sejak awal proses pembentukan atau pembahasan materi mitigasi bencana itu sendiri. Sudah cukup banyak kajian di bidang keagamaan yang secara mendalam berbicara tentang pelestarian lingkungan ataupun fatwa-fatwa yang berkenaan dengan perilaku yang merusak keseimbangan alam yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan sejak awal. Pemberian landasan teologis dan sosiologis dalam materi mitigasi bencana tentu akan sangat berguna untuk dijadikan sebagai pijakan lapisan warga masyarakat yang masih menempatkan aspek agama sebagai faktor terpenting dalam kehidupan mereka. Pemberian ruang yang cukup bagi elit agama dan kalangan akademisi yang dipandang memiliki otoritas dalam hal-hal keagamaan tentu juga akan merangsang tumbuhnya kesadaran bagi mereka atas pentingnya upaya secara sistematis yang harus ditempuh demi kemashlahatan umat manusia [13].

Kajian terkait fiqh kebencanaan yang selama ini cenderung masih bersifat individual harus segera dibuatkan wadah untuk kemudian bisa dirangkai menjadi salah satu materi yang ditawarkan dalam proses sosialisasi terkait mitigasi bencana. Pengarusutamaan wacana-wacana kebencanaan dalam forum-forum agama, seperti Bahtsul Masail [26], Majelis Tarjih [6], dan lainnya, mutlak untuk dilaksanakan demi tercapainya peningkatan kesadaran warga masyarakat akan dampak dan resiko bencana. Dalam hal ini, pemegang otoritas untuk merumuskan kebijakan terkait penanggulangan bencana, mungkin perlu untuk terlibat pada proses-proses bagaimana fatwa keagamaan terkait bencana bisa dihasilkan. Seringkali, proses perdebatan yang terjadi dalam sebuah bahtsul masail, misalnya, jauh lebih dinamis dan menarik untuk dikaji dibandingkan dengan hasil keputusannya itu sendiri. Oleh karena itu, Kehadiran pemegang otoritas kebencanaan dalam forum-forum Bahtsul Masail atau Sidang Majelis Tarjih, setidaknya akan bisa membuka perspektif-perspektif baru terkait kebencanaan, baik bagi peserta forum tersebut maupun bagi pihak pengambil kebijakan. Hasil kajian berupa fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan semacam inilah yang pada dataran akar rumput masih banyak diperhatikan dan diikuti, khususnya bagi mereka yang selama ini terafiliasi dan menjadikan organisasi keagamaan tertentu sebagai bagian dari identitas sosial mereka sehari-hari.

Selain pemanfaatan forum-forum kajian keagamaan “resmi” yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam *mainstream*, seperti NU dan Muhammadiyah, ada ratusan atau bahkan ribuan kajian keagamaan rutin yang diselenggarakan oleh umat Islam, baik dalam bentuk majelis taklim, mimbar khutbah Jum’at, pengajian selapanan, madrasah diniyah, dan kegiatan semacamnya, yang bisa dimanfaatkan untuk proses sosialisasi terkait isu kebencanaan. Tentu saja, pemanfaatan forum-forum yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini akan lebih mudah untuk dilakukan manakala program mitigasi ataupun pesan-pesan terkait dengan kebencanaan sudah mengakomodir dan terintegrasi dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh forum-forum resmi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, pesan terkait dengan program mitigasi bencana bisa saja dikemas dalam bentuk khutbah jum’at yang kemudian didistribusikan ke seluruh masjid untuk dibacakan oleh khatib. Hal ini akan lebih mudah untuk dilakukan, terlebih sekarang ini hampir di setiap desa sudah terbentuk semacam Forum Komunikasi Takmir dan Khotib (FKTK) atau dengan menggunakan nama yang berbeda akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Selain mempermudah mereka yang melaksanakan tugas sosialisasi di lapangan, pemanfaatan kegiatan-kegiatan keagamaan semacam ini tentu akan membawa dampak terhadap efisiensi kerja berbagai pihak, termasuk bagi masyarakat luas yang tidak perlu dipaksa untuk berkumpul meluangkan waktu mereka untuk kepentingan proses sosialisasi terkait mitigasi bencana.

Selain pelibatan elit agama dalam proses perencanaan mitigasi dan perluasan agen sosialisasi yang melibatkan lebih banyak mereka yang memiliki integritas keagamaan dan mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan, satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan peran agama dalam peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya program mitigasi bencana adalah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih menempatkan simbol-simbol agama sebagai salah satu pertimbangan penting dalam merespon apa yang mereka hadapi sehari-hari, bahkan kecenderungan tersebut juga melanda masyarakat perkotaan yang seringkali diklaim lebih berpikir rasional. Fenomena maraknya label “syar’i” dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari model pakaian hingga memilih rumah tinggal, sebenarnya menegaskan indikasi bahwa aspek agama harus dikelola sedemikian rupa agar bisa efektif dalam mengarahkan perilaku masyarakat, termasuk hal-hal yang bisa mendukung program mitigasi bencana bisa berjalan dengan baik dan efektif. Memang, terkadang pesan-pesan yang dikemas melalui wadah agama, khususnya terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang berorientasi ramah lingkungan, belum tentu bisa segera dinikmati hasilnya karena tidak secara langsung memberikan keuntungan material kepada warga masyarakat. Akan tetapi apabila

ada upaya sistematis dan dukungan dari semua pihak, termasuk elit agama, maka bukan hal yang mustahil peningkatan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana bisa segera terwujud.

4. Kesimpulan

Salah satu penyebab munculnya resistensi masyarakat untuk mematuhi prosedur mitigasi bencana adalah masih kuatnya nilai-nilai atau kepercayaan warga masyarakat, baik yang bersumber pada ajaran agama ataupun kearifan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa peran elit agama ataupun akademisi yang dipandang memiliki otoritas keagamaan seharusnya bisa lebih dioptimalkan. Ada beberapa poin yang patut untuk diperhatikan terkait dengan upaya untuk merekonstruksi peran agama dalam peningkatan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya program mitigasi bencana yang dicanangkan oleh pemerintah melalui pihak-pihak yang berwenang, diantaranya:

- a. Pelibatan elit agama dalam program mitigasi bencana hendaknya tidak hanya sebagai penyampai pesan semata, akan tetapi perlu dilibatkan sejak awal penyusunan rencana program mitigasi bencana dengan memanfaatkan forum-forum resmi organisasi keagamaan yang ada di tanah air. Hal ini penting untuk dilakukan, khususnya terkait dengan pemberian justifikasi teologis untuk memberikan rasa nyaman bagi warga masyarakat yang masih bergerak pada level agama, menurut pemahaman teori tiga tahap masyarakat yang dilontarkan oleh Comte.
- b. Perlu adanya upaya sistematis untuk melakukan pengarusutamaan isu-isu terkait kebencanaan dalam kajian fikih yang masih didominasi oleh hal-hal terkait urusan ibadah dan muamalah. Hal ini diperlukan untuk memberikan wadah atas kajian-kajian terkait lingkungan dalam perspektif agama yang sudah cukup banyak dilakukan akan tetapi terkesan bersifat sporadic dan tidak diakomodir dalam perencanaan program mitigasi bencana.
- c. Model program mitigasi bencana yang mengakomodir nilai-nilai agama akan memudahkan elit agama dan agamawan yang selama ini bergerak dalam kajian agama di kampung-kampung untuk terlibat aktif dalam proses sosialisasi aturan-aturan terkait mitigasi bencana secara lebih efisien, baik dari sisi biaya maupun waktu yang diperlukan terkait proses sosialisasi, meskipun efektivitas dari kegiatan ini tentu saja perlu untuk dikaji lebih jauh.

Referensi

- [1] Yulaelawati, E. (2008). *Mencerdasi Bencana: Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran*. Jakarta: Grasindo.
- [2] Purnomo, H., & Sugiantoro, R. (2010). *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan terhadap Bencana*. Jakarta: MedPress.
- [3] Madasari, O. (2018, 7 Agustus). Bencana, Azab, dan Logika Pengetahuan, *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4154284/bencana-azab-dan-logika-pengetahuan>
- [4] Indiyanto, A., & Kuswanjono, A. (2012). *Agama, Budaya, dan Bencana: kajian integratif ilmu, agama, dan budaya*. Yogyakarta: Mizan dan UGM.
- [5] Abdillah, M. (2005). *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Akademi Manajemen Perusahaan (AMPN), YKPN.
- [6] Muhammadiyah, P. P., & Tajdid, M. T. d. (2016). *Fikih Kebencanaan: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 tahun 2015 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- [7] Antara. (2019, 5 Januari). Korban Gempa dan Likuefaksi Petobo Menolak Direlokasi, *Media Indonesia*. Retrieved from <http://mediaindonesia.com/read/detail/208444-korban-gempa-dan-likuefaksi-petobo-menolak-direlokasi>
- [8] Calhoun, C. J. (2007). *Classical sociological theory* (2nd ed.). Malden, Mass.: Blackwell Pub.London: Routledge.
- [9] Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Jakarta: Deepublish.
- [10] Tim, C. I. (2018, 30 September). FPI: Gus Nur Tersangka, Palu Langsung Gempa, *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180930060031-20-334362/fpi-gus-nur-tersangka-palu-langsung-gempa>
- [11] Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren : studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- [12] Magnis-Suseno, F. (1988). *Etika politik : prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern* (Cet. 2. ed.). Jakarta: Gramedia.
- [13] M. Alie Humaedi, d. (2016). *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- [14] Ghazali, M. B. (2003). *Pesantren berwawasan lingkungan* (Cet. 3. ed.). Jakarta: Prasasti.
- [15] Heriyanto, H., & Gholami, R. (2007). *Menanam sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [16] Rubaidi. (2010). *Teologi bencana studi tentang konstruksi pemikiran teologi kyai tentang bencana di Jawa Timur*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel.
- [17] Janwari, Y. (2001). *Peranan kyai dalam perubahan sosial : studi di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut : laporan penelitian*. Bandung: Lembaga Penelitian, IAIN Sunan Gunung Djati.
- [18] Bruce, S. (2002). *God is dead : secularization in the West*. Oxford, UK ; Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
- [19] Smith, G. (2007). *A Short History of Secularism*. NewYork: I.B.Tauris.
- [20] Applebaum, W. (2003). *Encyclopedia of the Scientific Revolution: From Copernicus to Newton*

- [21] Biéowska, B. (2012). *The Scientific World of Copernicus: On the Occasion of the 500th Anniversary of his Birth 1473–1973*. New York: Springer Science & Business Media.
- [22] Turner, J. H., Leonard Beeghley, dan Charles H. Powers. (1995). *The Emergence of Sociological Theory*. Orlando: Wadsworth Publishing Company.
- [23] Firdaus. (2014). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Yogyakarta: Zikrul Media Intelektual.
- [24] Syarifuddin, A. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- [25] al-Qaradhawi, Y. (2017). *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar.
- [26] Hakim, L., Nasih, A. M., & Irfan, H. M. (2002). *Kajian fiqih sosial dalam bahtsul masail : studi kasus Pondok Pesantren (PP.) Lirboyo Kediri*. [Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dengan Indonesian Institute for Civil Society.
- [27] Zas, & Asr. (2019, 5 Januari). Warga Terdampak Tsunami Tolak Perubahan Lokasi Relokasi, *CNN Indonesia*.
- [28] Mulder, N. (1981). *Kepribadian Jawa dan pembangunan nasional* (Cet. ke-4. ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press : Sinar Harapan.
- [29] Nurhadi, A. (2008). *Kyai dan gerakan civil society : study [i.e. studi] tindakan sosial kyai menolak pembangunan PLTN : laporan penelitian individual*. Semarang: IAIN Walisongo.
- [30] Ritzer, G. (2010). *Classical sociological theory* (6th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- [31] Rokib, M. (2013). *Teologi Bencana: Studi Santri Tanggap Bencana*. Yogyakarta: Buku Pintal.
- [32] Sukarni. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kemenag RI.